

PERAN GENERASI Z DALAM MENGAWAL DEMOKRASI DAN PEMILU 2029: ANALISIS PARTISIPASI MAHASISWA DALAM MENCEGAH POLARISASI SOSIAL DAN HOAKS POLITIK

Ines Devita Anggraeni¹, Meutia Hasanah Efendy², Velysa Lely Rosellinda³, Reyna Syifa Aulia⁴,
Marsha Diva Damayanti⁵, Mutiara Fajrin Zafara⁶

¹anggraeniines762@gmail.com, ²hasanahmeutia@gmail.com, ³velysalely02@gmail.com,
⁴reynaulia2311@gmail.com, ⁵marshadiva520@gmail.com, ⁶Zafaramutiara@gmail.com

¹²³⁴⁵⁶Universitas Muhammadiyah Surabaya

ABSTRACT

Digital transformation has significantly changed the political communication patterns of society, especially for Generation Z, who grew up in an internet- and social media-based environment. This generation is a strategic group in the democratic process because they have broad access to political information and the ability to build public opinion through digital platforms. Ahead of the 2029 General Election, the political participation of Generation Z, especially students, has increased, marked by active involvement in political discussions, digital campaigns, voter education, and digital literacy movements. However, the high intensity of social media use also poses challenges in the form of social polarization, hate speech, echo chambers, and the spread of political hoaxes that have the potential to disrupt democratic stability. This study aims to analyze the role of Generation Z in maintaining the quality of democracy and overseeing the implementation of the 2029 General Election by increasing critical and responsible political participation. The study used a qualitative approach with a literature study method of various scientific journals, academic articles, and official documents relevant to the themes of digital democracy, political participation, and digital literacy. The results show that students as part of Generation Z have an important role as agents of change, social controllers, disseminators of credible information, and pioneers of digital literacy in dealing with political hoaxes. Nevertheless, the low ability to verify information and the high level of exposure to disinformation remain major challenges that must be addressed through strengthening digital literacy education and media ethics. This research is expected to contribute to strengthening the quality of Indonesian democracy to be healthier, more participatory, and inclusive in the digital era.

Keywords: *Generation Z, Digital Democracy, Political Participation, Political Hoaxes, Digital Literacy.*

ABSTRAK

Transformasi digital telah mengubah pola komunikasi politik masyarakat secara signifikan, khususnya pada Generasi Z yang tumbuh dalam lingkungan berbasis internet dan media sosial. Generasi ini menjadi kelompok strategis dalam proses demokrasi karena memiliki akses luas terhadap informasi politik serta kemampuan membangun opini publik melalui platform digital. Menjelang Pemilu 2029, partisipasi politik Generasi Z, khususnya mahasiswa, mengalami peningkatan yang ditandai dengan keterlibatan aktif dalam diskusi politik, kampanye digital, edukasi pemilih, hingga gerakan literasi digital. Namun, tingginya intensitas penggunaan media sosial juga menimbulkan tantangan berupa polarisasi sosial, ujaran kebencian, *echo chamber*, serta penyebaran hoaks politik yang berpotensi mengganggu stabilitas demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Generasi Z dalam menjaga kualitas

demokrasi dan mengawal pelaksanaan Pemilu 2029 melalui peningkatan partisipasi politik yang kritis dan bertanggung jawab. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur terhadap berbagai jurnal ilmiah, artikel akademik, dan dokumen resmi yang relevan dengan tema demokrasi digital, partisipasi politik, dan literasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa sebagai bagian dari Generasi Z memiliki peran penting sebagai agen perubahan, pengontrol sosial, penyebar informasi kredibel, serta pelopor literasi digital dalam menghadapi hoaks politik. Meskipun demikian, rendahnya kemampuan verifikasi informasi dan tingginya paparan disinformasi masih menjadi tantangan utama yang harus diatasi melalui penguatan pendidikan literasi digital dan etika bermedia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kualitas demokrasi Indonesia yang lebih sehat, partisipatif, dan inklusif di era digital.

Kata Kunci: Generasi Z, Demokrasi Digital, Partisipasi Politik, Hoaks Politik, Literasi Digital.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar terhadap kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik masyarakat modern. Internet dan media sosial kini menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi Generasi Z yang dikenal sebagai digital native. Generasi Z merupakan kelompok generasi yang lahir dan tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital sehingga memiliki kedekatan tinggi terhadap penggunaan internet, media sosial, dan berbagai platform komunikasi digital. Kondisi tersebut menyebabkan Generasi Z memiliki pengaruh besar dalam pembentukan opini publik dan arah demokrasi di Indonesia.

Dalam konteks demokrasi, media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana hiburan, tetapi juga menjadi ruang publik baru bagi masyarakat untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat, serta melakukan partisipasi politik (Saud & Margono, 2021). Platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan X (Twitter) telah menjadi media utama dalam penyebaran informasi politik. Mahasiswa sebagai bagian dari Generasi Z memiliki posisi strategis dalam menjaga kualitas demokrasi karena memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik, kemampuan berpikir kritis, serta akses informasi yang luas. Melalui media digital, mahasiswa dapat berperan sebagai agen

perubahan sosial yang mampu memberikan edukasi politik kepada masyarakat.

Menjelang Pemilu 2029, peran Generasi Z menjadi semakin penting karena kelompok ini diprediksi mendominasi jumlah pemilih produktif di Indonesia (Natalia et al., 2025). Tingginya jumlah pemilih muda memberikan dampak besar terhadap arah demokrasi nasional. Di satu sisi, kondisi ini dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan memperkuat demokrasi partisipatif. Pasal 22E dan Pasal 6A UUD 1945 menempatkan pemilu sebagai instrumen kedaulatan rakyat yang harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Irawan, 2026). Namun, di sisi lain, perkembangan media digital juga menghadirkan tantangan serius berupa penyebaran hoaks politik, ujaran kebencian, polarisasi sosial, serta manipulasi informasi yang dapat memecah persatuan masyarakat.

Hoax yaitu suatu berita informasi yang dengan sengaja ditambahi atau dikurangi dari informasi yang terjadi sebenarnya, ada unsur manipulasi data atau modifikasi yang berguna untuk mendapatkan respon yang cukup banyak hingga menjadi viral (Muttaqien & Irawan, 2021). Fenomena polarisasi sosial semakin terlihat sejak pelaksanaan pemilu sebelumnya, di mana masyarakat cenderung terpecah berdasarkan pilihan politik tertentu (Amri & Yandri, 2025). Polarisasi tersebut diperkuat oleh algoritma media sosial yang menciptakan

echo chamber sehingga pengguna hanya menerima informasi yang sesuai dengan pandangan mereka. Akibatnya, masyarakat menjadi rentan terhadap provokasi, disinformasi, dan konflik sosial. Hoaks politik juga berkembang sangat cepat melalui media sosial karena kemudahan akses dan rendahnya kemampuan sebagian masyarakat dalam melakukan verifikasi informasi (Restu Rahmawati, 2021).

Dalam situasi tersebut, mahasiswa sebagai bagian dari Generasi Z memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga stabilitas demokrasi. Mahasiswa dapat berperan sebagai pengawas demokrasi, pelopor literasi digital, serta agen edukasi politik bagi masyarakat. Peran tersebut penting untuk menciptakan ruang digital yang sehat, kritis, dan bertanggung jawab. Selain itu, mahasiswa juga dapat mendorong masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

Penelitian mengenai peran Generasi Z dalam demokrasi digital menjadi penting karena perubahan pola komunikasi politik terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Kajian ini tidak hanya membahas tingkat partisipasi politik Generasi Z, tetapi juga menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menjaga demokrasi di era digital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Generasi Z, khususnya mahasiswa, dalam mengawal demokrasi dan Pemilu 2029 melalui partisipasi politik yang kritis, peningkatan literasi digital, serta upaya pencegahan polarisasi sosial dan hoaks politik.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) sebagaimana digunakan dalam penelitian kajian demokrasi digital dan literasi media. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam terkait peran Generasi Z dalam demokrasi digital dan partisipasi

politik menjelang Pemilu 2029. Metode studi literatur digunakan untuk mengumpulkan berbagai informasi dan data dari sumber-sumber ilmiah yang relevan, seperti jurnal nasional dan internasional, artikel ilmiah, buku, prosiding, serta dokumen resmi pemerintah.

Data penelitian diperoleh melalui teknik dokumentasi dengan cara mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan topik demokrasi digital, partisipasi politik Generasi Z, literasi digital, hoaks politik, dan polarisasi sosial. Sumber data yang digunakan berasal dari publikasi ilmiah dalam rentang lima tahun terakhir agar data yang diperoleh lebih relevan dengan perkembangan teknologi dan kondisi demokrasi saat ini.

Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif analitis. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema tertentu, seperti partisipasi politik digital, peran mahasiswa, dampak media sosial, serta tantangan demokrasi digital. Setelah itu, data dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara penggunaan media digital dengan kualitas demokrasi dan partisipasi politik Generasi Z.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan triangulasi sumber untuk meningkatkan validitas data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber ilmiah agar diperoleh kesimpulan yang lebih objektif dan akurat. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai kontribusi Generasi Z dalam menjaga demokrasi Indonesia di era digital.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian berdasarkan studi literatur menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah

memberikan pengaruh besar terhadap pola partisipasi politik Generasi Z di Indonesia. Generasi Z menjadi kelompok masyarakat yang paling aktif dalam menggunakan media sosial sebagai sarana memperoleh informasi, membangun komunikasi politik, serta menyampaikan aspirasi publik. Tingginya intensitas penggunaan media sosial menyebabkan Generasi Z lebih cepat mengikuti perkembangan isu politik nasional dibandingkan generasi sebelumnya. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana hiburan, tetapi juga berkembang menjadi ruang demokrasi digital yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses politik.

Penelitian ini menemukan bahwa mahasiswa sebagai bagian dari Generasi Z memiliki tingkat partisipasi politik digital yang cukup tinggi. Bentuk partisipasi tersebut terlihat melalui keterlibatan dalam diskusi politik daring, penyebaran informasi edukatif mengenai demokrasi, kampanye anti-hoaks, hingga pengawasan terhadap kebijakan pemerintah melalui media digital. Mahasiswa juga memanfaatkan platform digital seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan X untuk menyampaikan kritik sosial dan membangun kesadaran politik masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa Generasi Z memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia.

Selain memberikan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi politik, penggunaan media sosial juga memunculkan berbagai tantangan baru dalam demokrasi digital. Penelitian menunjukkan bahwa penyebaran hoaks politik, disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial masih menjadi permasalahan utama menjelang pelaksanaan Pemilu 2029. Banyak pengguna media sosial yang belum memiliki kemampuan literasi digital yang baik sehingga mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Akibatnya, media sosial sering menjadi sarana penyebaran propaganda

politik yang dapat memicu konflik sosial di masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan verifikasi informasi menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh oleh konten provokatif yang beredar di media sosial. Fenomena *echo chamber* memperkuat kondisi tersebut karena pengguna media sosial cenderung hanya menerima informasi yang sesuai dengan pandangan politik mereka. Hal ini menyebabkan meningkatnya polarisasi sosial dan menurunnya sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat politik.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Generasi Z dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Mahasiswa dapat menjadi pelopor edukasi digital melalui penyebaran informasi yang kredibel, klarifikasi berita palsu, serta kampanye penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Namun di balik kemudahan itu, terdapat ancaman serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu penyebaran hoaks dan polarisasi di dunia maya yang dapat menggoyahkan dasar Demokrasi Pancasila (Salsabil, 2025).

Generasi Z dan Transformasi Demokrasi Digital

Generasi Z merupakan generasi yang lahir di tengah perkembangan teknologi digital sehingga memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Kedekatan Generasi Z dengan internet membuat mereka lebih aktif dalam menggunakan media sosial untuk memperoleh informasi, membangun komunikasi, dan menyampaikan pendapat. Dalam konteks demokrasi, media sosial telah menjadi ruang publik baru yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam diskusi politik.

Transformasi demokrasi digital memberikan peluang besar bagi Generasi Z untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi (Yanto & Sari, 2024).

Partisipasi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti kampanye digital, diskusi politik daring, pembuatan konten edukasi politik, serta pengawasan terhadap jalannya pemilu. Kehadiran media sosial juga membuat informasi politik lebih mudah diakses oleh masyarakat luas sehingga meningkatkan kesadaran politik generasi muda.

Namun, transformasi digital juga menghadirkan tantangan serius berupa penyebaran informasi yang tidak akurat, propaganda politik, serta manipulasi opini publik. Banyak informasi politik yang beredar di media sosial tidak melalui proses verifikasi yang jelas sehingga memicu munculnya hoaks politik dan disinformasi. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat mudah terprovokasi dan mengalami polarisasi sosial.

Peran Mahasiswa sebagai Agen Perubahan

Mahasiswa memiliki posisi penting dalam kehidupan demokrasi karena dianggap sebagai kelompok intelektual yang mampu berpikir kritis dan rasional. Dalam sejarah Indonesia, mahasiswa sering menjadi pelopor perubahan sosial dan penggerak demokrasi. Di era digital, peran mahasiswa tidak hanya dilakukan melalui aksi langsung di lapangan, tetapi juga melalui aktivitas digital.

Mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dengan cara memberikan edukasi politik kepada masyarakat melalui media sosial. Konten edukatif mengenai demokrasi, pemilu, literasi digital, dan bahaya hoaks dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kualitas demokrasi. Selain itu, mahasiswa juga dapat berperan sebagai pengontrol sosial yang mengawasi kebijakan pemerintah dan jalannya pemilu.

Peran mahasiswa dalam mengawal demokrasi juga terlihat melalui keterlibatan dalam berbagai organisasi sosial, komunitas

digital, dan gerakan literasi media (Larasati et al., 2025). Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa Generasi Z memiliki kepedulian tinggi terhadap isu-isu demokrasi dan keadilan sosial. Dengan kemampuan komunikasi digital yang baik, mahasiswa mampu menjangkau masyarakat luas dan membangun ruang diskusi yang lebih inklusif.

Hoaks Politik dan Polarisasi Sosial

Hoaks politik menjadi salah satu tantangan terbesar dalam demokrasi digital (Elizamiharti & Nelfira, 2024). Penyebaran informasi palsu sering digunakan untuk memengaruhi opini publik dan menyerang kelompok politik tertentu. Hoaks politik dapat memicu konflik sosial, meningkatkan kebencian antar kelompok, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Media sosial memiliki peran besar dalam mempercepat penyebaran hoaks karena informasi dapat dibagikan secara instan tanpa proses verifikasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital memberikan dampak besar terhadap perubahan perilaku komunikasi masyarakat, khususnya Generasi Z yang lebih aktif menggunakan media sosial sebagai sumber informasi utama (Zis et al., 2021). Selain menjadi sarana komunikasi, media sosial juga berkembang menjadi arena pertarungan opini politik yang memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Banyak pengguna media sosial cenderung langsung membagikan informasi tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya tingkat literasi digital masyarakat.

Polarisasi sosial juga menjadi dampak dari meningkatnya penyebaran hoaks politik. Masyarakat cenderung terpecah ke dalam kelompok-kelompok politik tertentu dan sulit menerima perbedaan pendapat. Fenomena echo chamber menyebabkan pengguna media sosial hanya menerima

informasi yang sesuai dengan pandangan mereka sehingga memperkuat sikap fanatisme politik (Kartika, 2026).

Dalam menghadapi kondisi tersebut, Generasi Z memiliki peran penting dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan inklusif (Larasati et al., 2025). Generasi Z dinilai memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang tinggi sehingga mampu menjadi pelopor dalam penyebaran informasi positif dan edukatif di ruang digital. Selain itu, keterlibatan generasi muda dalam aktivitas politik digital juga menunjukkan meningkatnya kesadaran demokrasi di kalangan masyarakat muda Indonesia (Natalia et al., 2025). Mahasiswa dapat membantu melakukan klarifikasi informasi, menyebarkan konten edukatif, serta mendorong masyarakat untuk lebih kritis dalam menerima informasi politik.

Literasi Digital sebagai Solusi Demokrasi Sehat

Literasi digital merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital secara bijak (Bastian et al., 2021). Literasi digital menjadi keterampilan penting di era modern karena masyarakat setiap hari berinteraksi dengan berbagai informasi melalui internet.

Peningkatan literasi digital dapat membantu masyarakat mengenali informasi palsu dan mengurangi penyebaran hoaks politik (Ratna, 2021). Program literasi digital juga dinilai efektif dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Dengan kemampuan literasi digital yang baik, masyarakat dapat memahami perbedaan antara fakta, opini, propaganda, dan disinformasi sehingga kualitas demokrasi dapat terjaga dengan lebih baik (Restu Rahmawati, 2021). Generasi Z yang memiliki kemampuan teknologi lebih baik diharapkan mampu menjadi pelopor dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Mahasiswa dapat memberikan edukasi

engenai cara memverifikasi informasi, mengenali sumber terpercaya, serta memahami etika dalam bermedia sosial.

Selain itu, literasi digital juga penting untuk membangun budaya demokrasi yang sehat (Sulaiman et al., 2024). Masyarakat yang memiliki literasi digital baik akan lebih mampu berpikir kritis, menghargai perbedaan pendapat, dan tidak mudah terprovokasi oleh isu politik yang bersifat manipulatif. Dengan demikian, penguatan literasi digital dapat menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas demokrasi menjelang Pemilu 2029.

Strategi Penguatan Peran Generasi Z dalam Demokrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Generasi Z memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi dalam penggunaan media sosial sebagai sarana partisipasi politik digital. Mahasiswa memanfaatkan platform digital untuk menyampaikan opini, mengikuti diskusi politik, menyebarkan edukasi demokrasi, serta melakukan pengawasan terhadap isu-isu publik. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa tingginya penggunaan media sosial menyebabkan Generasi Z lebih mudah memperoleh informasi politik secara cepat dan luas.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penyebaran hoaks politik dan polarisasi sosial masih menjadi tantangan utama dalam demokrasi digital. Banyak pengguna media sosial yang belum memiliki kemampuan verifikasi informasi secara optimal sehingga rentan terhadap disinformasi politik. Rendahnya literasi digital masyarakat menjadi faktor utama meningkatnya penyebaran berita palsu menjelang momentum politik.

Selain itu, mahasiswa sebagai bagian dari Generasi Z dinilai memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan demokratis. Mahasiswa mampu membangun edukasi politik digital melalui konten media sosial, kampanye anti-hoaks, dan gerakan literasi digital di lingkungan masyarakat.

Pembahasan

Pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan demokrasi digital memberikan perubahan besar terhadap pola partisipasi politik masyarakat, khususnya Generasi Z. Kehadiran media sosial telah menciptakan ruang publik baru yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam diskusi politik tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Generasi Z yang tumbuh bersama perkembangan teknologi digital memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap penggunaan media sosial sehingga lebih aktif dalam menyampaikan opini politik dan mengikuti perkembangan isu nasional.

Partisipasi politik Generasi Z dalam demokrasi digital menunjukkan adanya perubahan pola komunikasi politik dari konvensional menuju komunikasi berbasis digital. Jika sebelumnya partisipasi politik lebih banyak dilakukan melalui organisasi formal atau kegiatan tatap muka, saat ini media sosial menjadi sarana utama dalam membangun komunikasi politik masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi digital memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi secara lebih terbuka dan inklusif.

Mahasiswa sebagai bagian dari Generasi Z memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas demokrasi Indonesia. Sebagai kelompok intelektual, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai produsen informasi dan agen edukasi politik di masyarakat. Melalui media sosial, mahasiswa dapat menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik, mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya demokrasi, serta membantu meningkatkan kesadaran politik generasi muda. Peran tersebut memperlihatkan bahwa mahasiswa masih menjadi kekuatan moral dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

Namun, perkembangan demokrasi digital juga menghadirkan tantangan serius berupa penyebaran hoaks politik dan meningkatnya polarisasi sosial. Kemudahan akses informasi di media sosial sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menyebarkan propaganda politik dan informasi palsu demi memengaruhi opini publik. Penyebaran hoaks politik yang tidak terkendali dapat menurunkan kualitas demokrasi karena masyarakat menjadi sulit membedakan antara fakta dan manipulasi informasi.

Polarisasi sosial juga menjadi dampak yang cukup serius dalam demokrasi digital. Masyarakat cenderung terbagi ke dalam kelompok politik tertentu dan sulit menerima perbedaan pendapat. Algoritma media sosial yang hanya menampilkan informasi sesuai preferensi pengguna menyebabkan munculnya echo chamber yang memperkuat fanatisme politik. Akibatnya, ruang diskusi publik menjadi kurang sehat dan rentan menimbulkan konflik sosial.

Dalam kondisi tersebut, penguatan literasi digital menjadi solusi penting untuk menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dalam memahami informasi yang beredar di media sosial. Masyarakat yang memiliki literasi digital baik akan lebih mampu melakukan verifikasi informasi, memahami etika komunikasi digital, serta menghargai perbedaan pendapat dalam kehidupan demokrasi.

Pendidikan politik ialah suatu proses yang mengajarkan kepada masyarakat mengenai nilai-nilai, norma-norma, serta simbol-simbol politik melalui media berupa sekolah, pemerintah, dan juga partai politik (Irawan, 2019). Penguatan literasi digital perlu dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat. Perguruan tinggi dapat memberikan pendidikan mengenai etika digital, demokrasi, dan literasi media kepada

mahasiswa agar mampu menjadi pelopor penggunaan media sosial yang sehat. Pemerintah juga perlu memperkuat program literasi digital nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya hoaks politik dan ujaran kebencian.

Selain itu, media sosial juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap penyebaran disinformasi dan konten provokatif. Penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran hoaks politik menjadi langkah penting untuk menciptakan ruang digital yang aman dan demokratis. Dengan adanya kolaborasi yang baik antara berbagai pihak, Generasi Z diharapkan mampu menjadi generasi yang kritis, bijak, dan bertanggung jawab dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia menjelang Pemilu 2029.

Peran Generasi Z dalam Demokrasi Digital

Penguatan peran Generasi Z dalam demokrasi memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat (Sulaiman et al., 2024). Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membangun karakter mahasiswa yang kritis, demokratis, dan bertanggung jawab melalui pendidikan kewarganegaraan dan literasi media

(Susanti et al., 2025). Dukungan pemerintah melalui kebijakan literasi digital nasional juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Perguruan tinggi dapat berperan melalui penguatan pendidikan kewarganegaraan, literasi media, dan etika digital. Pemerintah juga perlu meningkatkan program edukasi digital untuk masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

Kolaborasi antara mahasiswa, komunitas digital, dan organisasi masyarakat sipil juga penting untuk menciptakan gerakan literasi digital yang lebih luas. Kampanye anti-hoaks, edukasi politik digital, dan diskusi publik berbasis media sosial dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan partisipasi politik yang sehat.

Selain itu, platform media sosial juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian. Regulasi yang jelas dan penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran hoaks dapat membantu menciptakan ruang digital yang lebih aman dan demokratis.

Tabel 1. Bentuk Partisipasi Politik Generasi Z dalam Demokrasi Digital Menjelang Pemilu 2029

No.	Bentuk Partisipasi Politik	Aktivitas Mahasiswa Generasi Z	Dampak terhadap Demokrasi
1	Diskusi politik digital	Mengikuti dan membuat diskusi politik melalui Instagram, TikTok, X (Twitter), dan YouTube	Meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat
2	Edukasi politik digital	Menyebarkan klarifikasi berita palsu dan edukasi verifikasi informasi	Membantu masyarakat memahami pentingnya demokrasi sehat
3	Kampanye anti-hoaks	PBKL dalam mata pelajaran keterampilan dan	Mengurangi penyebaran hoaks politik di media

		PKn, Agama	sosial
4	Pengawasan kebijakan publik	Memberikan kritik dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah melalui media digital	Mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2016

IV. KESIMPULAN

Generasi Z memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia di era digital, khususnya menjelang Pemilu 2029. Sebagai generasi yang tumbuh bersama perkembangan teknologi, Generasi Z memiliki kemampuan besar dalam memanfaatkan media digital untuk membangun partisipasi politik, menyebarkan edukasi demokrasi, serta menciptakan ruang diskusi publik yang lebih inklusif.

Mahasiswa sebagai bagian dari Generasi Z berperan sebagai agen perubahan, pengontrol sosial, dan pelopor literasi digital dalam menghadapi tantangan demokrasi modern. Peran tersebut sangat penting karena mahasiswa memiliki kemampuan akademik dan akses informasi yang lebih luas dibandingkan sebagian kelompok masyarakat lainnya sehingga mampu menjadi penghubung edukasi politik digital kepada masyarakat umum. Kehadiran mahasiswa di ruang digital mampu membantu masyarakat memahami pentingnya demokrasi yang sehat serta mendorong penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.

Meskipun demikian, perkembangan demokrasi digital juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran hoaks politik, polarisasi sosial, ujaran kebencian, dan manipulasi informasi. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital menjadi langkah penting untuk membangun masyarakat yang lebih kritis dan mampu melakukan verifikasi informasi secara mandiri.

Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, media, dan masyarakat

sangat diperlukan untuk memperkuat peran Generasi Z dalam menjaga demokrasi Indonesia. Upaya kolaboratif tersebut diharapkan mampu menciptakan ruang digital yang lebih sehat, demokratis, dan bebas dari penyebaran informasi palsu maupun ujaran kebencian yang dapat memicu konflik sosial di masyarakat. Dengan peningkatan literasi digital, pendidikan politik, dan etika bermedia, Generasi Z diharapkan mampu menjadi aktor utama dalam menciptakan demokrasi yang lebih sehat, partisipatif, dan inklusif di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Y., & Yandri, L. I. (2025). ALGORITMA MEDIA SOSIAL DAN POLARISASI POLITIK DALAM DEMOKRASI DIGITAL DI INDONESIA. *Jurnal Suara Politik*, 4(2), 3024–8566.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31869/jsp.v4i2.7608>
- Irawan, A. D. (2019). PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH MENJELANG PEMILU SERENTAK 2019. *Metafora: Education, Social Sciences and Humanities Journal*, 3(2), 17–25.
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/metafora/article/view/5742>
- Irawan, A. D. (2026). *RUU Pemilu: Legalitas yang Disusun untuk Membatasi Demokrasi?* Literasihukum.Com.
<https://literasihukum.com/ruu-pemilu-legalitas-yang-disusun-untuk-membatasi-demokrasi>
- Muttaqien, F. A., & Irawan, A. D. (2021). Penerapan Hukum Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui Media Sosial Era

- Pandemi Covid-19. *MEDIA of LAW and SHARIA*, 2(4), 305–315.
<https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.12016>
- Natalia, D., Sasmita, F., & Ahmad, M. R. S. (2025). Partisipasi Politik Generasi Z: Peran Media Sosial. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(02), 15772–15778.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.28067>
- Restu Rahmawati. (2021). Literasi Digital dalam Menghadapi Hoaks Menjelang Pemilu kepada Generasi Millenial. *BERDIKARI JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 4(01), 1–7.
<https://doi.org/https://doi.org/10.52447/berdikari.v4i1.4960>
- Salsabil, H. L. (2025). *Hoaks dan Polarisasi di Medsos, Ancaman bagi Demokrasi Pancasila*. Indonesiana.
<https://www.indonesiana.id/read/187436/hoaks-dan-polarisasi-di-medsos-ancaman-bagi-demokrasi-pancasila>
- Saud, M., & Margono, H. (2021). Indonesia’s rise in digital democracy and youth’s political participation. *Journal of Information Technology & Politics*, 18(4), 443–454.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1900019>
- Sulaiman, A., Fauzi, R., & Viviani, A. D. (2024). LITERASI POLITIK GENERASI Z DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI POLITIK DIGITAL. *Communicative : Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 5(01), 101–111.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47453/communicative.v5i1.3668>
- Susanti, R., Ikhlās, A., Desmaryani, S., Abubakar, Anwar, & Shaddiq, S. (2025). Literasi Digital sebagai Tameng Masyarakat terhadap Hoaks Politik di Tahun Pemilu: Studi Kasus di Media Sosial. *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 6(02), 860–869.